

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional merupakan bidang ilmu yang membahas hubungan dan interaksi antara negara satu dengan negara lain termasuk didalamnya mencakup pembuatan kebijakan, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional yang dianggap sebagai ilmu politik pun disisi lain mempelajari terkait ilmu filsafat, sejarah, hukum maupun ekonomi yang disertai dengan beberapa aspek penting dalam dunia hubungan internasional seperti diplomasi dan negosiasi. Dalam praktik hubungan internasional, negara-negara secara bersamaan membentuk sebuah sistem internasional yang kemudian menjadi sistem global. (Sorensen, 2013)

Hubungan internasional pun tidak jauh berbeda dengan kehidupan bermasyarakat sehari-hari dimana HI menitikberatkan setidaknya kepada lima aspek sosial yaitu keamanan, kebebasan, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Setiap aspek tersebut sangat diperhatikan di dunia internasional, sebagai contoh yaitu aspek keamanan dimana setiap negara membentuk suatu lembaga sebagai wadah untuk melindungi dan mengamankan negaranya masing-masing dari negara lain dan negara yang memiliki kesamaan geografis maupun yang memiliki kesamaan tujuan. Contoh lainnya yaitu aspek kesejahteraan dimana dalam menciptakan

perekonomian yang baik maka pemerintah suatu negara menegakkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Dalam hal ini kesejahteraan dan kekayaan sosial-ekonomi setiap warga negara dipengaruhi oleh kebijakan yang tepat untuk menyediakan banyak lapangan kerja, inflasi yang rendah, investasi yang stabil, pergerakan perdagangan serta komersial yang tidak terganggu dan lain sebagainya.

Dengan penjelasan diatas maka masyarakat mengharapkan negara untuk merespon dalam lingkungan ekonomi internasional dengan cara tertentu. Pada saat ini negara berusaha untuk membentuk serta mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dapat menjaga stabilitas perekonomian internasional. Sebagai contoh kebijakan pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi perekonomian negara baik dari jumlah investasi yang didapatkan negara maupun nilai tukar mata uang asing. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri, pemerintah melakukan perdagangan dengan negara lain.

Perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara bentuknya dapat terikat berdasarkan perjanjian perdagangan yang dilakukan suatu negara pada periode tertentu. Hal tersebut dapat membuat negara menjadi bergantung pada suatu komoditas yang diperjual belikan. Ketergantungan tersebut dapat berupa pemasukan terhadap kas negara yang cukup baik namun tidak menutup kemungkinan suatu negara mencoba untuk menghegemoni negara lain dengan cara memberikan pinjaman pada negara lain. Saling ketergantungan ekonomi merupakan tingkatan paling tinggi dalam keberlangsungan ekonomi internasional. Salah satu bentuk nyata pada sistem kontemporer dapat

Digambarkan oleh saling ketergantungan antara negara berkembang dan negara maju. Namun begitu, hal tersebut dapat dikatakan sebagai hal yang baik karena dengan memperluas pasar global, spesialisasi, efisiensi dan meningkatkan produktivitas maka kebebasan dan kekayaan secara keseluruhan pun akan meningkat. spesialisasi, efisiensi dan produktivitas suatu negara. Namun bagi sebagian lainnya ketergantungan tersebut ditakutkan dapat menyebabkan terlihatnya perbedaan antara negara yang memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan keuangan dengan negara yang lemah dan miskin.

Dalam hal ini, kekayaan dan kesejahteraan merupakan nilai-nilai fundamental pada hubungan internasional. Pendekatan pada studi hubungan internasional tersebut merupakan ciri dari teori-teori Ekonomi Politik Internasional (EPI) (Gilpin, 2013). EPI bergerak dengan asumsi bahwa ciri fundamental hubungan internasional adalah sosio-ekonomi, bukan hanya terkait politik dan militer.

Sebagian pakar bahkan berpendapat bahwa EPI adalah disiplin yang lebih komprehensif dan HI oleh karenanya dilihat sebagai sub-bidang EPI. Baik HI maupun EPI dapat menjadi sub-bidang dalam disiplin studi internasional yang lebih luas (Strange, 2013). Dengan begitu dapat diartikan bahwa adanya hubungan kompleks antara politik dengan ekonomi serta antara negara dengan pasar yang harus dikuasai oleh HI. Beberapa teori klasik dalam EPI salah satunya yaitu teori merkantilisme, dimana garis depan pembangunan negara modern adalah sudut pandang dunia terkait elite politik. Para teori ini, ditegaskan bahwa pembangunan negara yang kuat dapat tercipta jika

difokuskan pada aktivitas ekonomi. Dengan kata lain kaum merkantilis melihat bahwa ekonomi adalah alat politik atau suatu dasar bagi kekuatan politik. Teori lain dalam EPI yaitu liberalisme dan marxisme. Kontrol politik dan aturan-aturan permasalahan ekonomi yang mendominasi muncul dari kaum liberalis. Perkembangan pasar secara luas dan spontan tanpa campur tangan pemerintah diyakini oleh Adam Smith. Sedangkan disisi lain keyakinan kaum merkantilis disepakati pula oleh kaum marxis.

Disisi lain, implementasi merkantilis, yaitu bagaimana negara dapat bertahan pada persaingan antar negara dengan melakukan berbagai cara, seperti bepergian untuk memperluas wilayah kekuasaan dan memperoleh pendapatan dalam berbagai bentuk seperti emas, bahan baku, rempah-rempah dan sebagainya yang digunakan untuk mempertahankan perekonomian suatu negara. (Jackson & Sorensen, 1999).

Maka muncul suatu pandangan baru yaitu Neo-Liberalisme yang mana pandangan tersebut merupakan pembaharuan dari teori liberalisme pada dunia modern seperti saat ini. Dimana Neo-Liberalisme berpendapat bahwa negara pun dapat memainkan peranan penting yang mana peran tersebut yaitu untuk melancarkan jalannya suatu perekonomian pada negara tersebut.

Indonesia dan Vietnam memulai kerjasama sejak tahun 1955 dengan dibukanya Keduaan Besar Indonesia di Vietnam. Hal tersebut menjadi permulaan dilakukannya diplomasi Indonesia dengan Vietnam. Diawali dengan adanya diplomasi politik, pada kelanjutannya menyebar menjadi kerjasama bilateral yang lebih spesifik seperti kerjasama keamanan, kerjasama ekonomi, dan lain-lain. Kerjasama ini dilakukan guna menjamin kemakmuran

masyarakat masing-masing negara karena suatu negara wajib melakukan perencanaan dan melaksanakan agenda pembangunan perekonomian. Agenda pembangunan perekonomian tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan perdagangan internasional. Hampir seluruh negara di dunia melakukan perdagangan internasional baik melalui kegiatan ekspor maupun impor. Tidak terkecuali Indonesia maupun Vietnam, kedua negara tersebut telah melakukan kerjasama ekonomi sejak lama. Perdagangan yang dilakukan kedua negara pun memiliki progress yang cukup baik setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 nilai perdagangan Indonesia dan Vietnam mencapai 8,45 Miliar US Dollar dari berbagai komoditas. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dengan Vietnam melalui kegiatan impor komoditas besi dan baja.

Kegiatan impor yang dilakukan Indonesia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi besi dan baja di Indonesia sebagai bahan baku pembangunan infrastruktur dan bahan baku industri. Konsumsi besi dan baja di Indonesia sendiri terbilang cukup baik mengingat Indonesia belakangan ini gencar melakukan pembangunan. Konsumsi besi dan baja di Indonesia tercatat sekitar 12-14 juta ton per tahunnya, sedangkan kapasitas produksi dan industri besi dan baja dalam negeri hanya sekitar 7-9 juta ton per tahun. Kekurangan inilah yang mendorong Indonesia melakukan impor komoditas besi dan baja dari Vietnam.

Sejak tahun 2015, jumlah komoditas besi dan baja impor dari Vietnam terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menyebabkan produk besi baja impor membanjiri pasar domestic dan menimbulkan kerugian pada

industri besi dan baja Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi kekhawatiran pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi industri besi baja dalam negeri dan sekaligus menjadi tantangan bagi industri besi baja dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produsen internasional di pasar lokal dan internasional.

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menyelamatkan industri dalam negeri, seperti pasang pajak Biaya Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) dan Biaya Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk impor komoditas besi dan baja. Selain mengenakan pajak, pemerintah pun melakukan kerjasama dengan perusahaan - perusahaan yang berada dalam industri besi dan baja. Sebagai contoh, produsen besi dan baja dalam negeri menjadi pemasok utama dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Dengan dilakukannya kerjasama tersebut pemerintah berharap industri dalam negeri dapat pulih kembali.

Masalah yang terjadi dilapangan yaitu dengan banyaknya produk besi dan baja impor yang ada di pasar lokal membuat industri besi dan baja di Indonesia menjadi kesulitan, baik dalam hal memasarkan dan juga penjualan komoditas besi dan bajanya itu sendiri. Oleh karena itu sembari menyiapkan industri besi dan baja dalam negeri agar dapat meningkatkan produktivitas hingga delapan kali lipat, *Indonesian Iron And Steel Industry Association* (IISIA) bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam membentuk strategi dan kebijakan yang tepat untuk menghadapi permasalahan yang ada.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah yang dapat penulis tetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembatasan impor produk besi dan baja dari Vietnam ke Indonesia?
2. Bagaimana kondisi industri besi dan baja di Indonesia?
3. Bagaimana pembatasan impor produk besi dan baja dari Vietnam berdampak pada industri besi dan baja Indonesia?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat penulisan ilmiah menjadi terlampau luas, maka penulis menerapkan pembatasan masalah dalam pembahasan ini. Penulisan akan berfokus pada **kinerja IISIA serta Permerintah Indonesia dalam mengurangi impor besi-baja Vietnam ke Indonesia periode 2015-2020 dan pengaruhnya terhadap industri besi-baja dalam negeri.**

1.2.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah “Bagaimana kondisi industri besi dan baja Indonesia setelah diberlakukannya pembatasan terhadap impor besi dan baja dari Vietnam dan

bagaimana langkah pemerintah untuk menyelamatkan industri besi dan baja tahun 2015-2020?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses impor produk besi dan baja dari Vietnam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi industri besi dan baja di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak impor produk besi dan baja dari Vietnam terhadap industri besi dan baja di Indonesia
4. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang diberikan kepada industri besi dan baja di Indonesia dengan adanya produk besi dan baja impor dari Vietnam.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan penulis, adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai tambahan pengetahuan atas ilmu Hubungan Internasional berdasarkan penelitian yang dilakukan.
2. Melalui penelitian ini memberikan informasi terkait aktivitas impor besi dan baja dari Vietnam dan bagaimana dampaknya terhadap industri dalam negeri.